

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP No.24 Tahun 1997) dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP No.37 Tahun 1998)*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2009)
- Aartje Tehupeiory, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2012)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2008)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Arie S Hutagalung, Penerapan Lembaga *Rechtverweking* untuk Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi Negatif dalam Pendaftaran Tanah, Dalam *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2022)
- Bahtiar Efendi, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Bandung: Alumni, 1983)
- Basyarudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Pihak Ketiga Yang Membeli Tanah dan Bangunan Yang Telah Dibebani Hak Tanggungan*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2021)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2008)
- _____, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013)
- Eddy M Leks, *Yurisprudensi Hukum Properti Selama 70 Tahun (1952-2022)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2023)
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994)

- Erna Sri Wibawanti dan R Murjiyanto, *Hak atas Tanah & Peralihannya*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2013)
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Jaminan Jilid 2*, (Jakarta: CV Indhill Co, 2009)
- _____, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, (Jakarta: Ind-Hill, 2002)
- Gunanegara, Cita Hukum Pengaturan Sumberdaya Agraria Era 1960 dan Pasca Omnibus Law. Dalam *Dinamika Hukum Sumber Daya Alam*, (Malang: Inara Publisher, 2022)
- _____, *Hukum Administrasi Negara, Jual Beli dan Pembebasan Tanah*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2016)
- _____, *Hukum Pidana Agraria: Logika Hukum Pemberian Hak atas Tanah dan Ancaman Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2017)
- _____, *Mengenal Hukum Agraria & Real Estate Law*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2018)
- Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan & Pemberian Kuasa dalam Sudut Pandang KUHPperdata*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003)
- Hartono Soerjopratiknjo, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: PT Mustika Wikasa, 1994)
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007)
- Heru Prayitno dan Hamdan Zoelva, *Hukum Pertanahan (Akibat hukum atas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas dan Akta Kuasa Menjual terhadap Objek Tanah dan Bangunan Bersertifikat Yang Dibuak oleh Notaris dalam Perspektif Keadilan)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023)
- Irene Eka Sihombing, *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2017)
- Irma Devita Purnamasari, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, (Bandung: Kaifa, 2012)

- J Andy Hartanto, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Kepemilikan Tanah*, (Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2022)
- J Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997)
- _____, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 1995)
- _____, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992)
- Jimmy Joses Sembiring, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, (Jakarta: Visimedia, 2010)
- Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021)
- K Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1973)
- Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak: Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak*, (Jakarta: Cakrawala, 2012)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005)
- Mariam Darus Badruljaman, *et.al, Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001)
- Mhd Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2012)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)

- R Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta, 1989)
- R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, (Bandung: Tarsito, 1991)
- Robensjah Sjachran, *Hukum Properti: Karakteristik Perjanjian Jual Beli Properti dengan Sistem Inden*, (Jakarta: Kencana, 2021)
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012)
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermedia, 2002)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2008)
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Tim Penulis Leks&Co, *Hukum Properti*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018)
- Urip Santoso, *Hukum Perumahan*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- _____, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)
- _____, *Perolehan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

JURNAL

- Agus Budianto, "Legal Research Methodology Reposition in Research. On Social Science", *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol.9, 2020. DOI: <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.154>
- Alifa Ramadhanty Rachman, "Penetapan Terutang Pajak Saat Terjadinya Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan", *Unes Law Review*, Vol.6, No.1 September 2023. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Anita Afriana, *et.al*, "Batasan Asas Hakim Pasif dan Aktif Pada Peradilan Perdata", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.7, No.1 September 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.1078>

- Dewi Kurnia Putri dan Amin Purnawan, “Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas”, *Jurnal Akta*, Vol.4, No.4 Desember 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2505>
- Dian Apriandini dan Amad Sudiro, “Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lunas yang Belum Mendapatkan Pemecahan Sertipikat dari Developer yang Dipailitkan,” *Binamulia Hukum*, Vol.12, No.1 Juli 2023. DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.435>
- Firdaus Arifin, “Pengujian Peraturan Kebijakan dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Litigasi*, Vol.22, No.1 April 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v22i1.3751>
- Gunanegara, “Kebijakan Negara Pada Pengaturan Hak atas Tanah Pasca Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, No.2 April 2022. DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p161-184>
- _____, “Kekuatan Hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebagai Alas Hak Pengurusan Hak atas Tanah”, *Law Review*, Vol. XXI, No.3 Maret 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.19166/lr.v0i3.4864>
- Herri Swantoro, *et.al*, “Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum”, *Mimbar Hukum*, Vol.29, No.2 Juni 2017. DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.22103>
- Irwan Gomulja dan Habib Adjie, “Pengendalian Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sistem *Pre Project Selling*”, *Law and Justice*, Vol 9, Nomor 1 Juni 2020. DOI: <https://doi.org/10.23917/laj.v5i1.10395>
- Made Ara Denara Asia Amasanga dan I Made Dedy Priyanto, “Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan”, *Kerta Semaya*, Vol.8, No.1 Desember 2019. DOI: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/55865>
- Muhammad Ilyas, “Eksekusi Tanah Terhadap Putusan Serta Merta”, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol.3, No.1 Juni 2016. DOI: <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i1.3625>
- Nurul Khomariyah Syahroni dan Gunanegara, “Perlindungan Hukum Pemegang Sertipikat Hak Milik Yang Diterbitkan Kembali Sertipikat Atas Nama Pihak Ketiga Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”, *Notary Journal*, Vol.2, No.2 Oktober 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.19166/nj.v2i2.5766>

Untung Prasetya, “Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pwr)”, *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol.2, No.2 2020. DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti/v2i2.657>

HASIL PENELITIAN

Tirta Wuri Nuzumah, “Pengaruh Berlakunya SE Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala BPN Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan Terhadap Pelaksanaan Pengalihan Hak-Hak atas Tanah pada Profesi PPAT di Kabupaten Sleman”. Tesis, Yogyakarta: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2016

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5916)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881)
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1112)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 777)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1130)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli untuk Rumah Umum dan Satuan Rumah Susun Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 310)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1077)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijke Wetboek* Tidak Sebagai Undang-Undang

Surat Edaran Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 tertanggal 26 Maret 2024

Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Jkt. Pst tertanggal 02 Januari 2023

WEBSITE

Aprina Chintya, “Judicial Activism dalam Putusan Hakim”. <https://www.papurwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/357-judicial-activism-dalam-putusan-hakim>, diakses pada 09 November 2024

Irma Devita, “Pengikatan Jual Beli dan Kuasa untuk Menjual”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengikatan-jual-beli-dan-kuasa-untuk-menjual-lt548f3f2f8a900/>, diakses pada 08 Oktober 2024

Sedayu Indocity, “General Information FAQ (Surat Kepemilikan PIK 2, Serah Terima PIK 2 dan Perijinan”, https://www.sedayuindocity.com/p/blog-page_23.html, diakses pada 12 Mei 2024

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Hermanto, S.H., Pelaksana Kelompok Substansi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Whatsapp Video Call, Tanggal 31 Oktober 2024, Pukul 15.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Rizka Zamzami, S.H., Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Tanah dan Ruang di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Whatsapp Video Call, Tanggal 08 November 2024, Pukul 16.40 WIB.

Hasil wawancara dengan Robbyson Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Depok dan dosen Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, Video Call, Tanggal 01 November 2024, Pukul 21.00 WIB.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Tesis*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2022)

